

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap penataan diri perlu adanya sesuatu yang lain guna mendukung dan mengakui keberadaan yang layak dan pantas mengenai identitas diri seseorang. Identifikasi suatu identitas merupakan sebuah penegasan bahwa yang satu tidak sama dengan yang lain. “Sesuatu bukan yang lain” (*l’un n’est pas l’autre*).¹ Pencarian hubungan antara yang satu dengan yang lain sejak zaman Yunani klasik telah menjadi bagian dari refleksi filsafat politik. Totalitas untuk mengenal yang lain dimulai dari diri sendiri. Hal ini semacam siklus seseorang mulai mengenal dirinya sendiri kemudian ia terlempar keluar untuk mengenal orang lain. Dalam pengenalan akan yang lain ia kembali lagi pada dirinya sendiri dengan prinsip bahwa perlu mengidentikasi diri sendiri dan membuat pembedaan dengan yang lain. Oleh karena itu, sebagai pengakuan akan yang lain, kita dapat membahas tentang aturan yang mengatur polisemi pengenalan kata *pengakuan* dengan penggunaan term yang biasa dalam realitas kehidupan.

Berbicara tentang pengakuan sebagai *perjuangan untuk mengatasi salah pengakuan dan perjuangan untuk diakui oleh yang lain*, seorang filsuf kontemporer Paul Ricoeur menggetarkan daya intelektual dalam kesadaran manusia bahwa telah ada makna baru tentang Diskursus Pengakuan. Mengenai hal

¹Felix Baghi, *ALTERITAS, Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan (Etika Politik dan Postmodernisme)*, Epilog. Paul Budi Kleden, (Mauere: Ledalero, 2012), hal. 177 (dalam tulisan selanjutnya, penulis akan menggunakan singkatan Alteritas untuk merujuk pada judul buku tulisan Felix Baghi ini)

ini, Ricoeur pernah mengatakan bahwa, “*to recognize as, as having such and such quality*”.² Dengan demikian, untuk mengatasi tindakan salah mengakui yang lain, hanya dengan term pengakuan mutual, apa yang seharusnya diakui, dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dalam tindakan praktis.

Tema pengakuan ini dibahas dalam karya terakhirnya *The Course Of Recognition*.³ Suatu gagasan prinsipil yang harus dipelajari dan diaplikasikan dalam diri secara kolektif dan intensif. Pemikiran Ricoeur ini, merupakan karya mahapenting yang dipublikasikan 15 bulan sebelum kematiannya pada Mei 2005. Dengan demikian, karya ini sebagai karya terakhir yang menutup perjalanannya sebagai seorang filsuf.

Lantas dalam kehidupan di era perpolitikan postmodern ini, dalam konteks sistem politik orde reformasi di Indonesia, para kaum elit politik dan para pemangku kekuasaan kita sering salah mengakui manusia yang lain sebagai yang tidak ada apa-apanya ketika berkonfrontasi dengan mereka dan serentak mereka berjuang untuk diakui oleh yang lain. Persepsi ini merupakan keegoisan yang sangat hakiki. Hati nurani mereka telah digegerkan oleh tindakan mencuri dari hasil kekayaan negara yang juga milik umum. Koalisi gemuk parpol pun mengancam keselamatan negara. Semua kepentingan umum demi kesejahteraan

² Paul Ricoeur, *The Course Of Recognition*, trans. oleh David Pellauer, (Cambridge, MA: Havard University Press, 2005), hal. 7. “*Diakui sebagai*”, “*memiliki kualitas ini dan itu*”. Menjadi penegasan dalam bentuk pertanyaan bahwa, apa yang seharusnya atau perlu untuk diakui?

³ Karya ini adalah karya terakhir yang ditulis dalam bahasa Prancis dengan judul *Parcours De La Reconnaissance* dan merupakan kumpulan dari tiga konferensi yang diberikan Ricoeur di *Institut fur die Wissenschaften vom Menschen* di Viena, diterbitkan pada tahun 2004. Setahun sesudahnya, David Pellauer menerjemahkan karya ini ke dalam edisi bahasa Inggris dengan judul *The Course of Recognition*, dan diterbitkan oleh Havard University Press. Bdk. Paul Ricoeur, *The Course of Recognition*, diterj. oleh David Pellauer, (Cambridge, MA: Havard University Press 2005). Seluruh pembahasan ini akan merujuk pada edisi bahasa Inggris terjemahan David Pellauer.

bersama telah direngut oleh kepentingan individu dan kelompok tertentu. Realitas politik dikendalikan oleh kaum elit dan penguasa. Oleh karena itu, berkaitan dengan pandangan Ricoeur tentang perjuangan pengakuan dalam filsafat Hegel dan Axel Honneth, Pertanyaan utama adalah apa yang seharusnya diakui? Jika sikap egois para kaum elit politik dan para pemangku kekuasaan telah menciptakan keresahan bagi masyarakat Indonesia. Jawaban atas pertanyaan ini tidak terletak pada esensi pengakuan itu sendiri, tetapi pada usaha menemukan negosiasi untuk klaim-klaim pengakuan.

Kejagalan politik dalam penjelasan di atas, mencanangkan bahwa alangkah penting apabila etika Pengakuan Ricoeur hadir sebagai solusi yang mendasar. Konsep perjuangan untuk diakui oleh yang lain sangat diperlukan sebagai kebutuhan akan kontak sosial dalam pemahaman alteritas. Hal ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan interaksi sosial. Seseorang menjadi sungguh manusia membutuhkan kontak sosial yang bersifat resiprokal. Seorang manusia yang apabila diisolasi secara total selama bertahun-tahun tanpa berelasi baik dengan yang lain, tidak dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar untuk hidup sebagai seorang manusia.

Sebagai contoh, para kaum elit politik dan pemangku kekuasaan sebagai penyalur aspirasi masyarakat bisa memiliki beberapa status sekaligus (*status set*) secara serentak dalam kehidupan mereka. Maka tidaklah mengherankan kalau setiap mereka juga mempunyai beberapa peran yang penting dan berbeda-beda

pada waktu yang sama⁴. Inilah kenyataan yang menyebabkan ketimpangan politik karena terjadi siasat negatif untuk mencuri harta kekayaan negara. Oleh karena mereka menggunakan *status set* itu untuk kepentingan pribadi. Dengan begitu, kehidupan mereka menjadi semakin egois dikarenakan mereka memainkan peran dengan berdasarkan statusnya yang melebihi manusia lain mengakibatkan manusia yang satu melupakan eksistensi yang lain sebagai manusia yang hidup bersama. Mengenai persoalan ini, *pertama*, mereka salah mengakui bahwa seseorang atau masyarakat itu sungguh ada dalam perwujudan dirinya dan salah memberikan suatu penilaian terhadap identitas dirinya sebagai penyalur kesejahteraan untuk orang lain. Seseorang dalam arti yang lain itu ialah *masyarakat*. Kebenaran bagi kaum elit politik itu sendiri bersifat relatif. Benar menurut yang lain belum tentu benar menurut mereka. Menjadi salah bahwa mereka mengakui yang lain (*masyarakat*) sebagai yang salah. Dengan demikian, perlu adanya komunikasi dalam seni berbahasa yang bersifat terbuka (*openess*). Kaum elit dan pemangku kekuasaan perlu bersikap terbuka terhadap masyarakat. Dalam hermeneutika Ricoeur, yang dikutip oleh Kaelan, Ricoeur yang menegaskan bahwa, “manusia pada dasarnya terpahami melalui bahasa, dan bahasa itu sendiri merupakan syarat utama bagi semua pengalaman manusia demi mengenal yang lain”.⁵ Oleh karena itu, sangatlah perlu adanya suatu komunikasi politik yang bersifat mutual dan asimetris dan komunikasi itu berlangsung secara intensif.

⁴ Bernard Raho, *Sosiologi*, (Maumere: Ledalero, 2016), hal. 87

⁵ Kaelan, M.S, *Filsafat Bahasa, Hakikat Dan Realitas Bahasa*, (Yogyakarta: Paradigma, 2017), hal. 235

Kedua, demi diakuinya oleh yang lain, spontanitas kita sebagai manusia yang mempunyai tendensi untuk bersikap egois. Para kaum elit politik kita sering mengakui diri sendiri sebagai yang baik tanpa berpatokan pada norma dan standar kebaikan yang ada dengan memperhatikan yang lain sebagai pendukung (aspirasi masyarakat) terlaksana dan terwujudnya kebaikan. *Ketiga*, egoisme yang sudah menjadi kebiasaan dan telah merasuki pikiran manusia (kaum elit politik dan pemangku kekuasaan) dan implikasinya bagi tindakan manusia. Dalam arti ini, tertuju pada individualitas para kaum elit politik dan pemangku kekuasaan di Indonesia ketika tindakan mereka dikonfrontasikan dengan kehidupan bersama. Adanya yang lain tidak ada baginya. Ia ada karena dirinya sendiri, ia dipilih oleh masyarakat namun demi kepentingan individunya. Dengan demikian, bagaimana mengatasi pengakuan yang salah? Topik dari masalah pengakuan ini, dibahas khusus Ricoeur dalam 3 motif pengakuan yang menghantar pemahaman intelektual manusia menuju titik pencerahannya.

Paul Ricoeur dalam tulisannya, *pertama*, ia membuat dua term verba secara filosofis yakni *mengidentifikasi* dan *mendistingsi*. Identifikasi diri dan membuat pembedaan ialah bentuk untuk tidak salah mengenal diri sendiri dan tidak salah mengenal yang lain. Blaise Pascal pernah mengatakan bahwa, “*The essence of any mistake consists in not knowing*”.⁶ Jika ada seseorang yang mengetahui dan mengakui sesuatu identik dengan dirinya dengan serentak ia membuat pembedaan sesuatu itu dengan yang lain. Sebagai pemahaman bahwa pengakuan berarti mengidentifikasi lewat proses pembedaan. “*Mengidentifikasi*

⁶ Paul Ricoeur, *The Course Of Recognition*, *Op. Cit.*, hal 23. Esensi dari suatu kesalahan (mengakui) adalah tidak mengetahui.

berarti membedakan”.⁷ Pemahaman akan hal ini ialah sebagai rujukan menuju objek pengakuan yang menempatkan individu dalam konteks nilai bersama yang dimaknai secara kolektif.⁸ Oleh karena itu, Ricoeur menganggap perlu untuk mengawali diskursusnya mengenai pengakuan sebagai indentifikasi.

Paul Ricoeur melanjutkan konsepnya pada bagian yang *kedua* dengan membuat transisi dari pengakuan sebagai indentifikasi sampai pada tindakan *mengakui diri sendiri* (*se reconnaitre soi-meme*) secara lebih khusus. Ia mempunyai tujuan untuk mengafirmasi diri lewat tindakan tanggung jawab. Konsep diri dalam arti diri sebagai individu dan diri kolektif. Dua term ini adalah prakondisi bagi pemahaman tentang identitas diri. Ricoeur memulai pencarian tentang identitas diri ini dengan menelusuri dari perspektif filsafat praktis atau filsafat tindakan. Dengan demikian, kodrat alamiah berkata bahwa setiap orang ingin diakui karena memiliki kapasitas atau kesanggupan untuk mengakui tanggung jawabnya.⁹

Ketiga, Ricoeur berbicara tentang pengakuan mutual (*mutual recognition*).¹⁰ Pengakuan yang bersifat timbal balik dalam suatu bentuk terang relasi yang asimetris. Tema ketiga ini memberi penegasan tentang, “*all substances, in so far as they can be preceived to coexist in space, are in thoroughgoing*

⁷ Felix Baghi, *ALTERITAS*, hal. 160

⁸ Otto Gusti Madung, *Post-Sekularisme, Toleransi Dan Demokrasi*, (Maukere: Ledalero, 2017), hal. 89

⁹ Felix Baghi, *ALTERITAS*, hal. 161

¹⁰ *Ibid.*, hal. 176

reciprocity".¹¹ Perlu dilihat bersama di sini, bahwa secara komprehensif (keseluruhan) Ricoeur membangun diskursusnya tentang pengakuan dengan menggunakan kerangka teori hermeneutika seperti halnya ia lakukan dalam tulisan-tulisan sebelumnya. Pusat pemikirannya ada pada dialektika antara diri yang reflektif dan alteritas. Kita berusaha pertama-tama memperhatikan kategori struktur relasi satu terhadap yang lain untuk mengetahui dengan jelas pertentangan relasi itu dalam bentuk penolakan atau dalam hubungan yang asimetris.

Dengan menelaah etika pengakuan Paul Ricoeur, penulis menyadari bahwa terdapat masalah atau lubang besar ketimpangan dari praktek politik di Indonesia, di masaa orde reformasi ini. Tindakan para kaum elit politik dan para pemangku kekuasaan telah mengeliminasi cita-cita luhur (*bonnum communae*) dalam mengakui eksistensi yang lain. Berkaitan dengan pemahaman ini, etika yang diserukan Ricoeur tidak selaras dan tidak sejalan dengan tindakan para kaum elit politik dan para pemangku kekuasaan kita. Minimnya pemahaman akan etika politik dalam mencapai hidup yang baik, mengancam kejahteraan bersama yang diimpikan bangsa. Penulis mau mengajak kita untuk menyimak etika pengakuan Ricoeur dengan beberapa rujukan berikut ini; *Pertama*, sebagai manusia yang berciri sosial, kita perlu memahami diri sendiri sebagai manusia yang ada bersama dalam proses pengakuan diri dan pengakuan akan yang lain. *Kedua*, sebagai manusia yang ada bersama, harus adanya pengakuan terhadap yang lain sebagai

¹¹ Paul Ricoeur, *The Course Of Recognition, Op. Cit.*, hal 153. Semua substansi dapat saling menerima untuk hidup berdampingan dalam hubungan timbal balik yang bersifat komprehensif.

kebenaran pengakuan bukan kesalahan pengakuan. Mengatasi kesalahan pengakuan akan yang lain artinya tidak menghujat dan menjelekkan manusia yang lain. Memahami yang lain sebagai citra yang sama dari Sang Khalik. Dalam konteks inilah hati nurani sebagai pemegang peran utama. *Ketiga*, mengubah cara berpikir dan bertindak manusia dengan berprinsip pada jalan-jalan pengakuan Ricoeur sampai pada konsep akhirnya yakni *Pengakuan Mutual*.

Bertitik tolak pada alasan bahwa, tindakan yang benar dan selaras dengan etika pengakuan yang diserukan oleh Paul Ricoeur adalah sesuatu yang sangat penting dan mendesak untuk dipahami dan direalisasikan dalam tindakan nyata di tengah realitas politik di Indonesia pada era reformasi ini, maka perlu adanya pembenahan di dalam kehidupan politik Indonesia yang penuh ketimpangan dengan salah pengakuan akan identitas yang lain (masyarakat) sebagai yang ada bersama. Para politikus dan pemegang kekuasaan zaman sekarang, lebih mengutamakan paham egoisme dibandingkan paham sosialisme dan kolektivisme. Berdasarkan pada uraian-uraian di atas, penulis berusaha untuk mendalami pandangan Paul Ricoeur dan fakta tindakan menyimpang dari para pemangku kekuasaan maupun politikus dalam realitas kehidupan perpolitikan di Indonesia dalam konteks orde reformasi, tulisan ilmiah ini dikemas penulis dalam judul: **“KONSEP PERJUANGAN UNTUK DIAKUI DALAM PENGAKUAN MUTUAL PERSPEKTIF PAUL RICOEUR SEBAGAI SOLUSI BAGI SISTEM POLITIK DI INDONESIA (ERA REFORMASI)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk membantu peneliti membedah lebih dalam permasalahan di atas, maka berikut ini akan dirumuskan beberapa pertanyaan-pertanyaan penting dalam penelitian ini:

- 1) Apa itu konsep etika pengakuan menurut Paul Ricoeur?
- 2) Bagaimana fakta praktek sistem politik di Indonesia pada masa Reformasi?
- 3) Bagaimana penjelasan mengenai konsep perjuangan untuk diakui dalam pengakuan mutual menurut Paul Ricoeur sebagai solusi bagi sistem politik di Indonesia (orde reformasi)?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki tujuan mendasar yaitu untuk menemukan titik pijak bagaimana melihat pengakuan mutual sebagai suatu perjuangan untuk diakui dan perjuangan untuk mengatasi salah pengakuan dalam diri setiap individu. Individu yang bersangkutan itu baik para kaum elit politik dan para pemangku kekuasaan maupun berhubungan dengan diri orang lain yakni masyarakat itu sendiri, dalam terang pemikiran Paul Ricoeur. Penulisan ini juga bertujuan untuk membedah dan membenahi sistem politik di Indonesia pada masa reformasi. Oleh sebab itu, penulis akan melewati beberapa tahapan agar penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.3.1 Inventarisasi

Konsep etika pengakuan Paul Ricoeur yang tersebar dalam karyanya, dikumpulkan peneliti dan dikaji secara khusus dan juga praktek perjuangan untuk

diakui dalam terang etika pengakuan mutual yang menjadi sasaran bagi sistem politik di Indonesia. Pembahasan peneliti ini dikumpulkan dan dikaji pula secara komprehensif. Oleh karena itu, terlebih dahulu peneliti berusaha mengumpulkan karya Paul Ricoeur dan sumber-sumber mengenai konsep pengakuan mutual.

1.3.2 Sintesis

Berdasarkan inventarisasi kepustakaan Paul Ricoeur dan konsep perjuangan untuk diakui, serta praktek politik di Indonesia pada era reformasi, dan tentang Paul Ricoeur sendiri, peneliti berusaha memahami tema yang diajukan ini, yaitu Konsep Perjuangan Untuk Diakui Dalam Pengakuan Mutual Perspektif Paul Ricoeur Sebagai Solusi Untuk Membenahi Sistem Politik di Indonesia (Orde Reformasi). Penyelesaian masalah atas kesalahan pengakuan terhadap yang lain yang bersifat egois yang dilakukan oleh elit politik dan penguasa dalam konteks sistem politik di Indonesia, orde Reformasi.

1.3.3 Evaluasi Kritis

Peneliti tentu saja tidak akan berhenti pada studi kepustakaan. Untuk itu peneliti akan berusaha melengkapi kajian-kajian ini dengan evaluasi kritis dan catatan kritis yang seperlunya. Dengan demikian, peneliti dapat membangun pemahaman yang komprehensif mengenai judul di atas baik dari segi kelemahannya maupun dari segi kekurangannya.

1.3.4 Pemahaman Baru

Setelah menelaah dan mendalami argumen Paul Ricoeur tentang konsep pengakuan pada umumnya dan secara lebih khusus tentang pengakuan mutual, demi mengatasi kesalahan pengakuan akan yang lain dalam konteks sistem politik

di Indonesia, peneliti juga berusaha untuk menemukan pemahaman baru. Peneliti berharap bahwa dengan mempelajari Paul Ricoeur, peneliti dapat memiliki pemahaman yang benar dan tepat tentang etika pengakuan hingga pada pengakuan mutual dalam pandangan Paul Ricoeur.

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Masyarakat Umum

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi masyarakat terutama untuk membuka cakrawala dan wawasan pengetahuan tentang pengakuan mutual yang benar perspektif Paul Ricoeur. Di tengah ketimpangan sosial dan kecenderungan individu yang bersikap egois dengan memberi pengakuan yang salah terhadap kehadiran yang lain dalam ranah perpolitikan di Indonesia hendaknya gagasan Ricoeur ini menjadi instrumen pencerah di tengah kehidupan sosial bermasyarakat. Kiranya penelitian ini memiliki kesinambungan dengan realitas hidup untuk sedikit menjawab persoalan yang dihadapi mulai dari kesadaran diri sendiri (kaum elit politik/pemangku kekuasaan) yang fundamental dan kesadaran hidup bersama dalam masyarakat.

1.4.2 Civitas Akademika Universitas Katolik Widya Mandira Dan Fakultas Filsafat

Bagi Unwira dan Fakultas Filsafat. Penelitian ini mempunyai manfaat bagi segenap civitas akademika pada umumnya dan Fakultas Filsafat pada khususnya dalam menambah khazanah pengetahuan bagi etikawan muda tentang pengakuan mutual dalam pandangan Paul Ricoeur.

1.4.3 Diri Sendiri

Secara personal, peneliti ingin memperoleh pemahaman yang rasional, kritis, sistematis, komprehensif mengenai pemikiran Paul Ricoeur guna menjadikannya sebagai basis untuk mengatasi salah pengakuan terhadap yang lain dan perjuangan untuk diakui oleh yang lain dalam konteks sistem politik di Indonesia secara benar dan tepat. Di satu sisi, peneliti dapat membuka wawasan beripikir mengenai konsep pengakuan mutual Ricoeur secara kritis, sistematis dan menyeluruh, guna menanggapi kesulitan-kesulitan diri untuk secara benar mengakui yang lain dan membangkitkan kesadaran fundamental dalam diri, sehingga ada perwujudan hidup bersama, sebagai ada bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, penulis dapat menjadi pembela terhadap tindakan salah mengakui yang lain, juga menjadi penyalur wawasan pengetahuan tentang pengakuan mutual yang benar dan tepat bagi sesama dan juga bagi kaum intelektual pada umumnya.

1.5 Metode Penulisan

Dalam membahas dan menguraikan konsep Paul Ricoeur, penulis menggunakan metode *kepustakaan*. Dalam hal ini, saya akan menggunakan sejumlah sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema. Referensi-referensi ini juga dilengkapi oleh informasi dari kamus filsafat, media masa, dan artikel-artikel. Bahan-bahan ini kemudian disusun dalam cakupan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Metode selanjutnya yang dipakai penulis adalah metode *analisis*. Yang dimaksud dengan analisis adalah suatu metode yang digunakan penulis dengan cara menggunakan pemikiran tokoh untuk menganalisis

realitas. Dalam arti bahwa penulis menganalisis pemikiran Paul Ricoeur yang menjadi konsep penting untuk membenahi fakta sistem politik yang terjadi di Indonesia. Untuk itu ada beberapa hal yang penulis lakukan yaitu, *pertama*, penulis mengobservasi pemikiran Paul Ricoeur dengan cara mengumpulkan karya-karya tentangnya dan fakta praktek politik di Indonesia pada masa orde reformasi tanpa mengabaikan orde lama dan orde baru, baik itu karya primer maupun karya sekunder berupa monografi (risalah), artikel-artikel, buku-buku komentar, dan sebagainya. *Kedua*, setelah mengobservasi penulis melangkah lagi kepada tahap analisis pemikiran Paul Ricoeur dan fakta dari sistem politik di Indonesia. *Ketiga*, penulis mengklasifikasi atau mengelompokkan pemikiran dan fakta dari praktek politik yang menjadi sasaran dalam pembenahan berdasarkan pemikiran Paul Ricoeur. *Keempat*, setelah mengklasifikasi, barulah penulis membuat rujukan dari pemikiran Paul Ricoeur sebagai tolak ukur untuk membenahi sistem politik di Indonesia secara khusus pada era reformasi ini. Pandangan ini dilakukan dengan menggunakan referensi-referensi yang mana akan dilengkapi pula dengan ragam informasi dan data-data dari internet. Bahan-bahan itu disusun dalam cakupan tema yang dibahas dalam penulisan ini, untuk dianalisis dan dimengerti secara mendalam. Metode yang terakhir, penulis menggunakan *metode relevansi*. Dengan berdasarkan pemikiran Paul Ricoeur, penulis dapat memberikan deskripsi yang menjadi pedoman bagi sistem politik di Indonesia dan memberi solusi terhadap masalah-masalah ketimpangan praktek politik yang terjadi di Indonesia dalam konteks Era Reformasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Keseluruhan skripsi ini terdiri atas tiga bab. Bab I memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II adalah pemaparan yang berisi tentang riwayat hidup Paul Ricoeur, karya-karyanya, latar belakang pemikirannya serta hubungan dengan pemikir lain seperti, Thomas Hobbes, George Wilhelm Friedrich Hegel, Charles Taylor, dan Axel Honneth. Tujuan pemaparan ini yakni untuk memperoleh informasi yang cukup mengenai latar belakang pemikiran dan perkembangan intelektual Paul Ricoeur. Kemudian bab III memuat pokok-pokok penting dalam pemikiran Paul Ricoeur. Bab IV memuat pokok-pokok yang inti dari penulisan ini yakni menelaah konsep etika politik perseptif Paul Ricoeur sebagai pedoman dan memberikan sumbangsi untuk membenahi sistem politik yang ada di Indonesia pada era reformasi. Bab V memuat kesimpulan dari ulasan-ulasan sebelumnya, serta catatan kritis.